PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Komunikasi Politik Dalam *Reshuffle* Jilid V Kabinet Merah Putih

Akhmad Zaenutolibin
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia
Email: zaenutolibinakhmad@gmail.com

Article History:
Received: 19 Juni 2026
Revised: 20 Agustus 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Keywords: *Komunikasi Politik, Reshuffle, Kabinet Merah Putih.*

Abstract: *The Fifth Cabinet Reshuffle of the Red and White Cabinet conducted by President Prabowo Subianto on April 29, 2026, generated diverse discourses in the mass media, particularly regarding the strengthening of government communication through the appointment of the Head of the Government Communication Agency and the Presidential Special Advisor for Communication Affairs. Media coverage revealed debates over whether the reshuffle represented an effort to improve government communication or merely a strategy of political consolidation. Therefore, this study aims to analyze the representation of the cabinet reshuffle as a political communication strategy in the mass media. This study employed a qualitative approach using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) model. The research data consisted of nine news articles concerning the Fifth Reshuffle of the Red and White Cabinet published by Kompas, Tempo, and Jawa Pos during the period of April 29–May 5, 2026. The analysis was conducted through Fairclough's three dimensions: text analysis, discursive practice, and social practice. The findings indicate that the Fifth Cabinet Reshuffle of the Red and White Cabinet was represented differently across the media. Kompas and Tempo tended to frame the reshuffle as a form of political consolidation and the strengthening of governmental legitimacy, whereas Jawa Pos emphasized it as an effort to improve government communication and enhance administrative effectiveness. This study concludes that the fifth reshuffle of the Merah Putih Cabinet was represented in the media not only as an administrative mechanism for replacing government officials, but also as a political communication strategy aimed at strengthening governmental legitimacy, managing political image (impression management), and responding to public criticism and evolving public discourse. The findings suggest that the effectiveness of political communication is determined not solely by*

the government's capacity to manage and disseminate messages, but also by the extent to which the narratives it promotes are aligned with the substantive outcomes of policies experienced by society.

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kabinet merupakan instrumen utama Presiden dalam mengimplementasikan agenda pemerintahan. Melalui kabinet, Presiden menerjemahkan visi, misi, dan program politik ke dalam kebijakan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kualitas kabinet menjadi salah satu faktor penentu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Budiardjo, 2008). Kabinet ideal dalam sistem presidensial sering dikaitkan dengan konsep *zaken cabinet*, yaitu kabinet yang diisi oleh individu-individu yang dipilih berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan kapabilitas teknokratis, bukan semata-mata afiliasi politik. Dalam perspektif meritokrasi pemerintahan, pengisian jabatan publik yang berbasis kompetensi diyakini mampu meningkatkan efektivitas kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan (Dahlström & Lapuente, 2017; Peters & Pierre, 2004). Namun, pembentukan dan perombakan kabinet tidak hanya didorong oleh pertimbangan kinerja, melainkan juga oleh kebutuhan menjaga stabilitas politik dan keseimbangan koalisi pemerintahan (Laver & Shepsle, 1996). Kam dan Indrioason menjelaskan bahwa reshuffle kabinet pada banyak pemerintahan modern tidak semata-mata dilakukan sebagai mekanisme evaluasi kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajemen politik untuk mempertahankan dukungan elite dan mengelola dinamika kekuasaan (Kam & Indridason, 2005).

Praktik politik dalam sistem presidensial sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas. Literatur mengenai pembentukan kabinet menunjukkan bahwa pengisian jabatan menteri tidak selalu didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, melainkan juga dipengaruhi oleh kebutuhan menjaga stabilitas politik, mengakomodasi kepentingan partai pendukung, dan mempertahankan keseimbangan koalisi pemerintahan. Laver & Schofield (1990) menjelaskan bahwa distribusi jabatan dalam kabinet sering menjadi instrumen untuk menjaga keberlangsungan dukungan politik terhadap pemerintah. Muller & Strom (2000) menegaskan bahwa kabinet dalam sistem demokrasi modern tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai arena negosiasi politik antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda.

Kesenjangan antara teori dan praktik tersebut tampak dalam dinamika reshuffle Kabinet Merah Putih pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada 27 April 2026 Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet yang melibatkan sejumlah posisi strategis pemerintahan, termasuk pengangkatan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Pengangkatan Hasan Nasbi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 53/P Tahun 2026 dan diumumkan secara resmi dalam pelantikan di Istana Negara Jakarta (Pos, 2026a; Tempo, 2026a). *Reshuffle* kabinet seharusnya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan melalui perbaikan kinerja dan penyegaran organisasi. Namun, berbagai tanggapan publik yang muncul di media massa menunjukkan bahwa *reshuffle* tersebut lebih banyak dipersepsikan sebagai upaya pemerintah memperkuat komunikasi politik dibandingkan melakukan perubahan substantif terhadap kinerja pemerintahan. Fokus perubahan pada sektor komunikasi pemerintah memunculkan persepsi bahwa persoalan utama yang ingin diatasi bukan semata-mata persoalan kebijakan, melainkan persoalan narasi dan penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara fungsi ideal reshuffle sebagai instrumen peningkatan kapasitas pemerintahan dengan fungsi aktualnya sebagai strategi komunikasi politik.

Kendati demikian, dalam perspektif komunikasi politik, tindakan pemerintah tidak pernah bersifat netral. McNair (2017) menjelaskan bahwa setiap tindakan politik pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi karena mengandung pesan yang ditujukan kepada khalayak. Itu artinya, *reshuffle* kabinet dapat dipahami bukan hanya sebagai keputusan administratif, tetapi juga sebagai pesan politik yang dikirimkan pemerintah kepada masyarakat. Pergantian pejabat tertentu mengandung simbol-simbol yang dimaksudkan untuk menunjukkan responsivitas, keseriusan, dan kemampuan pemerintah dalam menjawab kritik publik. Pandangan tersebut diperkuat oleh Edelman (1964) melalui konsep *symbolic politics* yang menjelaskan bahwa banyak tindakan politik dilakukan untuk membangun persepsi publik mengenai kemampuan pemerintah mengendalikan situasi. Dalam konteks ini, reshuffle kabinet dapat dipandang sebagai tindakan simbolik yang dirancang untuk menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan pembenahan internal. Oleh karena itu, makna reshuffle tidak hanya terletak pada perubahan personalia, tetapi juga pada pesan yang ingin dikonstruksi dan dikomunikasikan kepada masyarakat.

Selain sebagai tindakan simbolik, reshuffle kabinet juga dapat dianalisis melalui konsep impression management yang dikemukakan Goffman. Menurut Goffman (1959), aktor sosial berusaha mengelola kesan yang muncul di hadapan audiens melalui berbagai bentuk penampilan dan tindakan strategis. Dalam konteks pemerintahan, pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah dan pengangkatan penasihat khusus bidang komunikasi dapat dipahami sebagai upaya institusional untuk memperkuat pengelolaan citra dan narasi pemerintah di ruang publik. Fenomena ini menjadi semakin relevan pada era disrupsi informasi ketika persepsi publik terhadap pemerintah tidak hanya dibentuk oleh kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan. Penelitian mengenai reshuffle kabinet telah dilakukan dari berbagai perspektif. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek politik kelembagaan, dampak ekonomi, maupun konstruksi media, dan belum secara spesifik mengkaji reshuffle sebagai strategi komunikasi politik pemerintahan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji reshuffle kabinet dari berbagai perspektif. Darmawan & Jati (2012) menyoroti konstruksi pemberitaan reshuffle dalam media massa, sementara Supramono dkk. (2017) serta Budastra dkk. (2022) menganalisis dampak reshuffle terhadap pasar modal Indonesia. Dari perspektif hukum tata negara, Afrizal (2024) menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden yang dalam praktiknya dipengaruhi dinamika politik nasional. Penelitian terbaru oleh Mubarok (2025) menunjukkan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih lebih banyak didorong oleh kebutuhan stabilisasi politik dibanding evaluasi kinerja. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji reshuffle sebagai strategi komunikasi politik pemerintah dalam mengelola persepsi publik dan krisis narasi pemerintahan. Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai reshuffle kabinet umumnya berfokus pada aspek pemberitaan media, dampak ekonomi, hukum tata negara, serta stabilitas politik pemerintahan. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji reshuffle kabinet sebagai strategi komunikasi politik pemerintah dalam menghadapi krisis narasi dan kritik publik.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena memfokuskan analisis pada representasi diskursus publik mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V, khususnya terkait pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Penelitian ini tidak hanya melihat reshuffle sebagai instrumen distribusi kekuasaan politik, tetapi juga sebagai upaya *strategic political*

communication dan *impression management* pemerintah dalam membangun kembali kepercayaan publik melalui media massa. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana diskursus publik dalam media massa (Kompas, Tempo, Jawa Pos) merepresentasikan kebijakan reshuffle Jilid V sebagai strategi komunikasi politik pemerintahan?"

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough (Fairclough, 2010). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam pemberitaan media massa mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V, khususnya terkait pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan penunjukan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Metode Analisis Wacana Kritis digunakan karena penelitian tidak hanya berfokus pada isi teks pemberitaan, tetapi juga berusaha mengungkap bagaimana media mengonstruksi realitas sosial, merepresentasikan kebijakan pemerintah, serta membentuk persepsi publik terhadap reshuffle kabinet sebagai strategi komunikasi politik. Dalam perspektif Fairclough, bahasa tidak dipahami sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan relasi kekuasaan, ideologi, dan proses pembentukan makna dalam masyarakat (Fairclough, 1995).

Sumber data penelitian terdiri atas berita, artikel analisis, tajuk rencana, dan opini yang memuat pembahasan mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V yang dipublikasikan oleh media massa nasional, yaitu Kompas, Tempo, dan Jawa Pos. Pemilihan ketiga media tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa media-media tersebut memiliki jangkauan pembaca yang luas, reputasi jurnalistik yang kuat, serta secara konsisten memberikan perhatian terhadap isu-isu politik nasional. Data penelitian difokuskan pada publikasi yang terbit selama periode April hingga Mei 2026, yaitu sejak diumumkannya reshuffle kabinet hingga berkembangnya berbagai respons dan diskursus publik di ruang media. Pemilihan data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* karena memungkinkan peneliti memilih sumber data yang paling relevan dan kaya informasi sesuai dengan tujuan penelitian (Patton, 2015).

Teknik ini juga dipilih karena penelitian tidak bertujuan memperoleh jumlah data yang besar, melainkan memilih teks yang paling relevan untuk mengungkap konstruksi wacana mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V. Kriteria pemilihan data meliputi: (1) berita secara langsung membahas reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V; (2) memuat pembahasan mengenai penguatan komunikasi pemerintahan, pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), atau penunjukan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi; (3) mengandung tanggapan, interpretasi, atau penilaian dari aktor politik, pengamat, maupun media terhadap kebijakan reshuffle; dan (4) diterbitkan dalam rentang waktu 29 April–5 Mei 2026 sebagai periode awal terbentuknya diskursus publik pascareshuffle. Rentang waktu tersebut dipilih karena merupakan fase awal pembentukan opini publik ketika intensitas pemberitaan dan perdebatan mengenai reshuffle kabinet berada pada tingkat tertinggi, sehingga memungkinkan peneliti menangkap konstruksi wacana yang masih relatif dominan dan belum mengalami pergeseran isu.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sembilan artikel yang dinilai paling representatif karena mencerminkan variasi sudut pandang media terhadap reshuffle kabinet. Kesembilan artikel tersebut terdiri atas tiga artikel dari Kompas, tiga artikel dari Tempo, dan tiga artikel dari Jawa Pos sehingga memungkinkan perbandingan representasi wacana antar media secara lebih proporsional. Jumlah data dianggap memadai dalam penelitian kualitatif karena analisis wacana kritis lebih menekankan kedalaman interpretasi terhadap teks daripada kuantitas data yang

dianalisis. Selain itu, ketiga media dipilih karena merepresentasikan karakter pemberitaan yang berbeda dalam lanskap media nasional. Kompas dikenal sebagai media arus utama yang cenderung menampilkan perspektif moderat dan analitis, Tempo memiliki tradisi jurnalisme investigatif serta pendekatan yang lebih kritis terhadap kebijakan publik, sedangkan Jawa Pos merepresentasikan media dengan orientasi pemberitaan yang lebih informatif dan dekat dengan isu-isu praktis pemerintahan. Variasi karakter tersebut memungkinkan penelitian memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontestasi wacana reshuffle kabinet dalam ruang publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi (Denzin & Lincoln, 2018). Peneliti menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan seluruh teks berita yang relevan dengan tema penelitian, khususnya pemberitaan yang membahas reshuffle kabinet, pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), penunjukan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, serta berbagai tanggapan publik yang muncul dalam media massa. Seluruh dokumen yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi substansi dengan fokus penelitian sehingga diperoleh data yang representatif untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data dilakukan menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang terdiri atas tiga dimensi analisis. Dimensi pertama adalah analisis teks (*text analysis*), yaitu analisis terhadap unsur-unsur linguistik dalam pemberitaan seperti pilihan kata (diksi), metafora, struktur kalimat, judul berita, penggunaan narasumber, dan pola argumentasi yang digunakan media dalam merepresentasikan reshuffle kabinet.

Dimensi kedua adalah praktik diskursif (*discursive practice*), yang berfokus pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks. Pada tahap ini peneliti menganalisis bagaimana media mengonstruksi makna reshuffle kabinet melalui pemilihan sumber informasi, penekanan isu tertentu, serta pola penyajian berita kepada khalayak. Dimensi ketiga adalah praktik sosial (*social practice*), yaitu penafsiran hubungan antara teks media dengan konteks sosial-politik yang lebih luas, termasuk dinamika komunikasi politik pemerintahan Prabowo-Gibran, upaya pengelolaan citra pemerintah, serta respons publik terhadap efektivitas kebijakan reshuffle kabinet. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengkaji berbagai pemberitaan dari Kompas, Tempo, dan Jawa Pos guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi wacana yang berkembang (Creswell & Creswell, 2018). Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan memadukan perspektif komunikasi politik, *symbolic politics*, dan impression management dalam proses interpretasi data. Selain itu, peneliti juga menerapkan peer debriefing melalui diskusi akademik dengan rekan sejawat guna mengurangi subjektivitas penafsiran dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Representasi Reshuffle Kabinet dalam Teks Media

Berdasarkan analisis terhadap sembilan artikel yang diterbitkan oleh Kompas, Tempo, dan Jawa Pos selama periode 29 April–5 Mei 2026, ditemukan adanya tiga kecenderungan representasi terhadap reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V, yaitu representasi sebagai konsolidasi kekuasaan, representasi sebagai upaya perbaikan komunikasi pemerintahan, dan representasi sebagai strategi peningkatan efektivitas kinerja. Pada level teks (text analysis), Kompas cenderung menggunakan diksi yang menempatkan reshuffle dalam kerangka konsolidasi kekuasaan dan pertimbangan politik. Dalam berita berjudul *"Reshuffle Kabinet Prabowo Lebih Sarat Konsolidasi Kekuasaan, Harapan Kabinet Zaken Makin Jauh"*, Kompas mengutip pernyataan Yunarto Wijaya yang menegaskan bahwa arah perombakan kabinet masih didominasi

faktor koalisi politik dan kedekatan personal dibandingkan kapabilitas. Penggunaan istilah seperti *"konsolidasi kekuasaan"*, *"balas budi politik"*, *"lingkaran kekuasaan"*, dan *"kabinet zaken makin jauh"* menunjukkan framing yang menempatkan reshuffle sebagai instrumen penguatan basis politik Presiden daripada upaya memperkuat profesionalisme pemerintahan.

Kecenderungan serupa juga terlihat dalam berita Kompas lainnya yang berjudul *"Reshuffle Kabinet untuk Konsolidasi Politik Diprediksi Masih Sering Terjadi hingga 2029"*. Dalam pemberitaan tersebut, Arya Fernandes menilai bahwa reshuffle lebih didasarkan pada kalkulasi politik daripada orientasi peningkatan kinerja pemerintahan. Penggunaan frasa seperti *"menguatkan dukungan politik"*, *"mengonsolidasi semua kekuatan politik"*, dan *"kalkulasi politik"* memperkuat konstruksi bahwa reshuffle dipahami sebagai mekanisme manajemen koalisi dan stabilisasi kekuasaan. Bahkan, narasi mengenai penguatan komunikasi pemerintahan melalui pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah tetap ditempatkan dalam konteks konsolidasi politik yang lebih luas. Sementara itu, Tempo juga menampilkan kecenderungan kritis terhadap reshuffle kabinet. Dalam artikel opini berjudul *"Reshuffle Kelima Kabinet Prabowo: Bukan Kabinet Zaken"*, Tempo secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak sedang membentuk kabinet profesional, melainkan mengumpulkan para pendukung politiknya ke dalam kabinet. Penggunaan istilah *"bukan kabinet zaken"* menunjukkan adanya evaluasi normatif terhadap proses reshuffle dengan membandingkannya pada konsep kabinet profesional berbasis meritokrasi. Framing tersebut memperkuat persepsi bahwa pertimbangan politik lebih dominan dibandingkan pertimbangan kompetensi dalam proses pengisian jabatan pemerintahan.

Berbeda dengan Kompas dan Tempo, Jawa Pos cenderung mengonstruksi reshuffle sebagai langkah administratif dan upaya perbaikan komunikasi pemerintahan. Dalam berita *"Reshuffle Kabinet Merah Putih: Presiden Prabowo Resmi Lantik 6 Pejabat Baru"*, fokus pemberitaan diarahkan pada proses pelantikan pejabat baru, perubahan posisi jabatan, dan penjelasan mengenai struktur pemerintahan. Narasi yang dibangun lebih bersifat informatif dan tidak memberikan penilaian eksplisit terhadap motif politik di balik reshuffle. Pilihan bahasa yang digunakan cenderung netral dengan penekanan pada keberlanjutan program pemerintahan. Perspektif yang lebih substantif muncul dalam artikel opini Jawa Pos berjudul *"Agar Reshuffle Membenahi Komunikasi Pemerintah, Bukan Sekadar Mengganti Wajah"*. Artikel tersebut memandang reshuffle sebagai momentum untuk memperbaiki komunikasi pemerintah yang dinilai belum optimal. Namun demikian, penulis menegaskan bahwa perubahan struktur kelembagaan harus diikuti dengan perubahan pola komunikasi, peningkatan transparansi, serta keterbukaan terhadap kritik publik. Dengan demikian, Jawa Pos tidak sepenuhnya mengabaikan dimensi kritis, tetapi lebih menempatkan reshuffle sebagai peluang reformasi komunikasi pemerintahan daripada sekadar instrumen konsolidasi politik.

Analisis teks keseluruhan menunjukkan adanya perbedaan orientasi pemberitaan antar media. Kompas dan Tempo lebih dominan membingkai reshuffle sebagai bentuk konsolidasi politik dan penguatan legitimasi kekuasaan, sedangkan Jawa Pos lebih menonjolkan aspek administratif, efektivitas pemerintahan, dan perbaikan komunikasi publik. Perbedaan framing tersebut menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam membentuk makna dan persepsi publik terhadap kebijakan reshuffle kabinet.

Tabel 1. Analisis Teks Pemberitaan Antar Media

Media	Judul Berita	Kutipan Relevan	Sumber URL
Kompas	Reshuffle Kabinet	"Arah perombakan dinilai masih akan	https://www.kompas.id/artikel/reshuffle-

	Prabowo Lebih Sarat Konsolidasi Kekuasaan(Kompas, 2026b)	didominasi pertimbangan politik... memupuskan harapan menuju kabinet profesional."	kabinet-prabowo-lebih-sarat-konsolidasi-kekuasaan-harapan-kabinet-zaken-makin-jauh
Kompas	"Reshuffle" Kabinet untuk Konsolidasi Politik Diprediksi Sering Terjadi hingga 2029.(Kompas, 2026c)	"Dari reshuffle sebelumnya, hampir selalu motifnya adalah kalkulasi politik, jarang yang ditujukan untuk tujuan kinerja."	https://www.kompas.id/artikel/reshuffle-kabinet-untuk-konsolidasi-politik-diprediksi-masih-sering-terjadi-hingga-2029
Tempo	Reshuffle Kelima Kabinet Prabowo: Bukan Kabinet Zaken(Tempo, 2026b)	"Presiden bukan ingin membuat kabinet zaken... melainkan mengumpulkan barisan pendukungnya ke dalam kabinet."	https://www.google.com/search?q=https://www.tempo.co/kolom/reshuffle-kelima-kabinet-prabowo-2132129&authuser=3
Kompas	"Reshuffle" Tak Sentuh Menteri Parpol Pendukung Prabowo, Risiko Politik Dihindari (Kompas, 2026a)	"Penentuan kabinet sangat kompromistis dengan mempertimbangkan kekuatan partai di DPR serta kontribusinya."	https://www.kompas.id/artikel/golkar-menteri-dari-parpol-tetap-berpeluang-kena-reshuffle
Tempo	Prabowo Reshuffle Kabinet, Hasan Nasbi hingga Dudung Masuk(Tempo, 2026a)	"Presiden minta saya membantu proses komunikasi, berkomunikasi maksimal untuk program kerja pemerintah."	https://www.tempo.co/politik/prabowo-reshuffle-kabinet-hasan-nasbi-hingga-dudung-masuk-2131995
Tempo	Fakta-fakta Reshuffle Kabinet Prabowo Jilid V(Tempo, 2026c)	"Tujuannya, kata Hasan, adalah untuk memperkuat komunikasi pemerintah. 'Supaya pesan-pesan yang ingin ke publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat."	https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-reshuffle-kabinet-prabowo-jilid-v-2132129

Jawa Pos	Reshuffle Kabinet Merah Putih: Presiden Prabowo Resmi Lantik 6 Pejabat(Pos, 2026a)	"Pejabat baru diminta langsung tancap gas menuntaskan program prioritas, terutama sektor ekonomi kerakyatan."	https://www.jawapos.com/nasional/2604270315/reshuffle-kabinet-merah-putih-presiden-prabowo-resmi-lantik-6-pejabat-baru
Jawa Pos	Rocky Gerung Singgung Menteri Mantan Napi Saat Hadiri Reshuffle(Pos, 2026b)	"...menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi."	https://www.jawapos.com/politik/2604270400/rocky-gerung-singgung-menteri-mantan-napi-saat-hadiri-reshuffle-kabinet-prabowo-di-istana
Jawa Pos	Agar Reshuffle Membenahi Komunikasi Pemerintah(Wahyutama, 2026)	"Perubahan ini harus disertai perubahan attitude dari para juru bicara pemerintah dalam merespons kritik."	https://www.jawapos.com/opini/2604290046/agar-reshuffle-membenahi-komunikasi-pemerintah-bukan-sekadar-mengganti-wajah

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada level teks (*text analysis*), Kompas dan Tempo cenderung menggunakan diksi yang mengarah pada interpretasi politis terhadap reshuffle kabinet. Istilah seperti *"konsolidasi kekuasaan"*, *"kalkulasi politik"*, *"mengumpulkan barisan pendukung"*, dan *"bukan kabinet zaken"* menunjukkan adanya penekanan bahwa reshuffle tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan profesionalisme atau meritokrasi, melainkan lebih terkait dengan kebutuhan menjaga stabilitas politik dan memperkuat dukungan terhadap pemerintahan. Pilihan kata tersebut membangun representasi bahwa reshuffle merupakan bagian dari strategi pengelolaan kekuasaan dan konsolidasi koalisi politik. Sebaliknya, Jawa Pos lebih banyak menampilkan narasi yang berorientasi pada aspek administratif dan efektivitas pemerintahan.

Pemberitaan mengenai pelantikan pejabat baru, penugasan untuk menjalankan program prioritas, serta pentingnya pembenahan komunikasi pemerintah menunjukkan kecenderungan media ini dalam mengonstruksi reshuffle sebagai langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan fungsi komunikasi publik. Bahkan ketika menghadirkan pandangan kritis, Jawa Pos lebih menekankan perlunya perubahan substantif dalam pola komunikasi pemerintah dibandingkan menyoroti dimensi konsolidasi politik. Perbedaan konstruksi wacana tersebut menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif membentuk makna terhadap suatu peristiwa politik. Dalam perspektif Fairclough, pilihan leksikal, penonjolan isu tertentu, dan cara media menghadirkan narasumber merupakan bagian dari praktik diskursif yang merefleksikan posisi ideologis media dalam memaknai realitas sosial (Fairclough, 1995). Dengan demikian, reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V direpresentasikan secara berbeda oleh masing-masing media sesuai dengan sudut pandang dan kerangka interpretasi yang digunakan dalam pemberitaan.

B. Praktik Diskursif: Kontestasi Narasi antara Kinerja dan Politik

Pada dimensi praktik diskursif (*discursive practice*), ditemukan adanya kontestasi narasi antara pemerintah dan media. Narasi yang dibangun pemerintah berpusat pada kebutuhan memperbaiki pola komunikasi publik. Hal ini terlihat dari penekanan terhadap penguatan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan penunjukan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi sebagai bagian dari strategi meningkatkan efektivitas penyampaian program pemerintah kepada masyarakat. Namun demikian, narasi tersebut tidak diterima secara seragam oleh media. Kompas dan Tempo menghadirkan berbagai pandangan pengamat politik yang menilai bahwa reshuffle lebih berkaitan dengan kebutuhan menjaga stabilitas politik dan memperkuat loyalitas elite pendukung pemerintah. Sebaliknya, Jawa Pos lebih banyak menonjolkan aspek keberlanjutan program pemerintahan dan urgensi peningkatan koordinasi komunikasi publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media menjadi arena diskursif tempat berbagai aktor politik berkompetisi dalam mendefinisikan makna reshuffle kabinet. Dengan kata lain, makna reshuffle tidak ditentukan secara tunggal oleh pemerintah, tetapi merupakan hasil negosiasi wacana yang berlangsung dalam ruang publik.

C. Praktik Sosial: *Reshuffle* sebagai Strategi Komunikasi Politik Pemerintah

Pada level praktik sosial (*social practice*), reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V dapat dipahami sebagai respons pemerintah terhadap meningkatnya kritik publik terhadap kinerja komunikasi pemerintahan. Perubahan pada sektor komunikasi menunjukkan adanya kesadaran bahwa legitimasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan McNair (2017) yang menyatakan bahwa setiap tindakan politik pada hakikatnya merupakan bentuk komunikasi politik. Dalam konteks penelitian ini, reshuffle kabinet berfungsi sebagai pesan simbolik yang ingin menunjukkan bahwa pemerintah responsif terhadap kritik publik dan berupaya melakukan pembenahan internal. Dari perspektif symbolic politics yang dikemukakan Edelman (1964), reshuffle kabinet dapat dipandang sebagai tindakan simbolik untuk membangun persepsi bahwa pemerintah sedang melakukan perubahan. Pergantian pejabat komunikasi tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga berfungsi sebagai simbol komitmen pemerintah dalam memperbaiki hubungan dengan publik. Sementara itu, konsep impression management dari Goffman (1959) membantu menjelaskan bahwa pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah dan penunjukan penasihat komunikasi merupakan upaya pemerintah mengelola kesan (impression) yang muncul di ruang publik. Pemerintah berusaha membangun citra sebagai pemerintahan yang terbuka, responsif, dan mampu menjawab kritik masyarakat melalui penguatan fungsi komunikasi politik.

1. *Political Balancing* dan Dilema Meritokrasi

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa reshuffle kabinet mengandung dimensi political balancing. Dalam sistem multipartai, Presiden tidak hanya mempertimbangkan efektivitas birokrasi, tetapi juga kebutuhan menjaga stabilitas politik dan dukungan koalisi pemerintahan. Oleh karena itu, reshuffle menjadi instrumen untuk mempertahankan keseimbangan antara tuntutan profesionalisme dan kepentingan politik. Namun demikian, dominasi pertimbangan politik dalam pemberitaan media menimbulkan persepsi bahwa prinsip meritokrasi belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam proses reshuffle. Temuan ini sejalan dengan argumentasi Kam dan Indriðason yang menyatakan bahwa reshuffle kabinet pada banyak pemerintahan modern tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kinerja, tetapi juga digunakan sebagai instrumen manajemen politik guna mempertahankan dukungan elite dan stabilitas pemerintahan.(Kam & Indridason, 2005) Dalam konteks penelitian ini, representasi media menunjukkan bahwa reshuffle lebih banyak dipahami sebagai mekanisme pengelolaan koalisi politik dibandingkan evaluasi profesional terhadap kinerja pejabat yang diganti. Kondisi

tersebut memperlihatkan adanya dilema antara tuntutan meritokrasi dan kebutuhan menjaga keseimbangan politik pemerintahan. Peters dan Pierre menegaskan bahwa pengisian jabatan publik yang berbasis kompetensi merupakan prasyarat penting bagi efektivitas pemerintahan (Peters & Pierre, 2004). Senada dengan itu, Dahlström dan Lapuente menunjukkan bahwa institusi yang lebih meritokratis cenderung menghasilkan kualitas tata kelola yang lebih baik (Dahlström & Lapuente, 2017). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus media lebih banyak menempatkan reshuffle dalam kerangka stabilitas politik daripada penguatan profesionalisme kabinet.

Narasi mengenai konsolidasi kekuasaan yang muncul dalam sejumlah pemberitaan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal kabinet profesional (zaken cabinet) dengan praktik politik yang berkembang dalam pemerintahan. Menurut konsep *zaken cabinet*, pengisian jabatan pemerintahan idealnya didasarkan pada kompetensi, profesionalisme, dan kapabilitas individu, sehingga kabinet dapat bekerja secara efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam perspektif ini, reshuffle kabinet seharusnya menjadi instrumen evaluasi kinerja yang berorientasi pada peningkatan efektivitas pemerintahan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa media lebih banyak merepresentasikan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V sebagai bagian dari strategi konsolidasi politik dan penguatan legitimasi pemerintahan daripada sebagai upaya memperkuat meritokrasi kabinet.

Temuan tersebut terlihat dari dominannya narasi mengenai kalkulasi politik, akomodasi kepentingan koalisi, dan loyalitas politik dalam pemberitaan Kompas dan Tempo. Sementara itu, narasi mengenai profesionalisme dan kompetensi pejabat yang diangkat tidak memperoleh porsi yang sama kuat dalam diskursus media. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik reshuffle yang berkembang dalam pemberitaan media masih berada dalam tarik-menarik antara kebutuhan menjaga stabilitas politik dan tuntutan pembentukan kabinet profesional. Dengan demikian, reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V memperlihatkan adanya ketegangan antara idealisme zaken cabinet sebagai model kabinet berbasis meritokrasi dengan realitas politik pemerintahan presidensial yang menuntut keseimbangan kekuatan politik. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa reshuffle kabinet tidak hanya merupakan keputusan administratif, tetapi juga arena negosiasi kepentingan politik dan komunikasi pemerintahan.

2. Reshuffle sebagai Respons terhadap Krisis Narasi Pemerintah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V tidak hanya dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian struktur pemerintahan, tetapi juga merupakan respons terhadap krisis narasi yang berkembang di ruang publik. Dalam berbagai pemberitaan yang dianalisis, fokus perubahan justru berada pada sektor komunikasi pemerintahan melalui pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan penunjukan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah memandang persoalan komunikasi sebagai salah satu tantangan utama dalam menjaga legitimasi publik terhadap berbagai program pemerintahan. Dalam perspektif komunikasi politik, legitimasi pemerintah tidak hanya dibangun melalui keberhasilan kebijakan, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah menjelaskan, membingkai, dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan fungsi komunikasi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki hubungan antara negara dan publik di tengah meningkatnya kritik terhadap berbagai program pemerintah. Temuan ini sejalan dengan pandangan Canel dan Sanders yang menegaskan bahwa komunikasi pemerintah merupakan bagian integral dari proses pemerintahan modern yang berfungsi menjelaskan kebijakan publik, membangun hubungan dengan warga negara, serta mendukung legitimasi institusi politik (Canel & Sanders, 2013).

Namun demikian, diskursus yang berkembang dalam media menunjukkan bahwa penguatan komunikasi tidak secara otomatis dipersepsikan sebagai solusi atas persoalan pemerintahan. Sejumlah pemberitaan tetap menempatkan reshuffle dalam kerangka konsolidasi politik dan pengelolaan citra pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas strategi komunikasi politik sangat bergantung pada konsistensi antara pesan yang disampaikan dengan substansi kebijakan yang dijalankan. Ketika komunikasi publik tidak diikuti oleh perubahan yang dirasakan masyarakat, maka reshuffle berpotensi dipersepsikan hanya sebagai tindakan simbolik tanpa dampak substantif terhadap kinerja pemerintahan. Dengan demikian, reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V dapat dipahami sebagai upaya pemerintah mengelola legitimasi politik melalui penguatan komunikasi publik. Temuan ini memperlihatkan bahwa dalam era disrupsi informasi, komunikasi politik tidak lagi berfungsi sekadar sebagai sarana penyampaian kebijakan, tetapi telah menjadi bagian dari strategi pemerintahan untuk mempertahankan legitimasi dan membangun dukungan publik terhadap agenda politik yang dijalankan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V direpresentasikan media tidak hanya sebagai pergantian pejabat pemerintahan, tetapi juga sebagai praktik komunikasi politik yang berkaitan dengan pengelolaan legitimasi dan kekuasaan. Pada level teks, Kompas dan Tempo cenderung membingkai reshuffle sebagai instrumen konsolidasi politik melalui penggunaan diksi seperti “konsolidasi kekuasaan”, “kalkulasi politik”, dan “bukan kabinet zaken”, sedangkan Jawa Pos lebih menonjolkan aspek administratif, efektivitas pemerintahan, dan perbaikan komunikasi publik. Pada level praktik diskursif, ditemukan adanya kontestasi narasi antara pemerintah yang memposisikan reshuffle sebagai upaya memperkuat komunikasi publik dan media yang sebagian besar mengaitkannya dengan kebutuhan menjaga stabilitas politik. Sementara pada level praktik sosial, reshuffle dipahami sebagai respons terhadap kritik publik sekaligus strategi pemerintah dalam membangun dan mempertahankan legitimasi politik melalui penguatan fungsi komunikasi pemerintahan. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa penguatan komunikasi publik tidak hanya diwujudkan melalui perubahan struktur kelembagaan dan pergantian aktor komunikasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas kebijakan serta respons yang lebih substantif terhadap kebutuhan masyarakat. Media juga perlu terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen agar ruang publik tetap menjadi arena diskusi yang kritis dan konstruktif. Penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan analisis wacana media dengan survei opini publik atau analisis media sosial untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas reshuffle kabinet sebagai strategi komunikasi politik pemerintah.

Daftar Pustaka

Afrizal. (2024). Reshuffle Kabinet dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Inicio Legis*, *5*(2). https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27590

Budastra, M. A., Effendy, L., Hudaya, R., & Budastra, I. K. (2022). Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Pengumuman Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid I dan II. *Jurnal Bisnis Terapan*, *6*(1). https://doi.org/10.24123/jbt.v6i1.4792

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Canel, M. J., & Sanders, K. (2013). *Government Communication: Cases and Challenges*. Bloomsbury Academic.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5 ed.). SAGE Publications.

Dahlström, C., & Lapuente, V. (2017). *Organizing Leviathan: Politicians, Bureaucrats, and the Making of Good Government*. Cambridge University Press.

Darmawan, J. J., & Jati, B. B. P. (2012). Kecenderungan Pemberitaan tentang Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II di SKH Jawa Pos dan SKH Kompas. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *9*(2). https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/168

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5 ed.). SAGE Publications.

Edelman, M. (1964). *The Symbolic Uses of Politics*. University of Illinois Press.

Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.

Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2 ed.). Routledge.

Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Anchor Books.

Kam, C., & Indridason, I. H. (2005). The Timing of Cabinet Reshuffles in Five Westminster Parliamentary Democracies. *Legislative Studies Quarterly*, *30*(3), 327–363.

Kompas. (2026a). Golkar, Menteri dari Parpol Tetap Berpeluang Kena Reshuffle. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/golkar-menteri-dari-parpol-tetap-berpeluang-kena-reshuffle

Kompas. (2026b). Reshuffle Kabinet Prabowo Lebih Sarat Konsolidasi Kekuasaan, Harapan Kabinet Zaken Makin Jauh. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/reshuffle-kabinet-prabowo-lebih-sarat-konsolidasi-kekuasaan-harapan-kabinet-zaken-makin-jauh

Kompas. (2026c). Reshuffle Kabinet untuk Konsolidasi Politik Diprediksi Masih Sering Terjadi hingga 2029. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/reshuffle-kabinet-untuk-konsolidasi-politik-diprediksi-masih-sering-terjadi-hingga-2029

Laver, M., & Schofield, N. (1990). *Multiparty Government: The Politics of Coalition in Europe*. Oxford University Press.

Laver, M., & Shepsle, K. A. (1996). *Making and Breaking Governments: Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies*. Cambridge University Press.

McNair, B. (2017). *An Introduction to Political Communication* (6 ed.). Routledge.

Mubarok, R. (2025). Legal and Political Analysis of the Red and White Cabinet Reshuffle Based on Good Governance Principles. *Siyasah Dusturiyah: State Law Review*, *1*(3), 111–124. https://doi.org/10.65101/2eky2y10

Muller, W. C., & Strom, K. (Ed.). (2000). *Coalition Governments in Western Europe*. Oxford University Press.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4 ed.). Sage Publications.

Peters, B. G., & Pierre, J. (2004). *Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The Quest for Control*. Routledge.

Pos, J. (2026a). Reshuffle Kabinet Merah Putih: Presiden Prabowo Resmi Lantik 6 Pejabat Baru. *JawaPos.com*. https://www.jawapos.com/nasional/2604270315/reshuffle-kabinet-merah-putih-presiden-prabowo-resmi-lantik-6-pejabat-baru

Pos, J. (2026b). Rocky Gerung Singgung Menteri Mantan Napi Saat Hadiri Reshuffle. *JawaPos.com*. https://www.jawapos.com/politik/2604270400/rocky-gerung-singgung-menteri-mantan-napi-saat-hadiri-reshuffle-kabinet-prabowo-di-istana

Supramono, Wilis, W., & Utami, I. (2017). Market Reaction to Cabinet Reshuffle: The Indonesian Evidence. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *7*(5), 183–188.

Tempo. (2026a). Prabowo Reshuffle Kabinet, Hasan Nasbi hingga Dudung Masuk. *Tempo.co*. https://www.tempo.co/politik/prabowo-reshuffle-kabinet-hasan-nasbi-hingga-dudung-masuk-2131995

Tempo. (2026b). Reshuffle Kelima Kabinet Prabowo: Bukan Kabinet Zaken. *Tempo.co*. https://www.tempo.co/kolom/reshuffle-kelima-kabinet-prabowo-2132129

Tempo. (2026c, April 27). *Fakta-Fakta Reshuffle Kabinet Prabowo Jilid V*. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-reshuffle-kabinet-prabowo-jilid-v-2132129

Wahyutama. (2026). Agar Reshuffle Membenahi Komunikasi Pemerintah, Bukan Sekadar Mengganti Wajah. *JawaPos.com*. https://www.jawapos.com/opini/2604290046/agar-reshuffle-membenahi-komunikasi-pemerintah-bukan-sekadar-mengganti-wajah